

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



**Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jln. Panglima Batur No. 51 Kandangan 71211, Telp. (0517) 21242 Fax. (0517) 21242**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Capaian realisasi Tahun 2019 ini telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan semua indikator kinerja utama telah dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 - 2023 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2019 – 2023.

Didalam pengelolaan keuangan daerah sudah ditentukan penjadwalan sesuai siklus yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah akan terus bekerja sesuai penjadwalan dan siklus yang telah ditetapkan. Apa lagi dalam hal realisasi anggaran walaupun pada akhir tahun realisasi mencapai 84,53% dari target tahunan yang ditetapkan namun pada penyerapan anggaran bulan-bulan sebelumnya masih sangat rendah dari anggaran kas yang telah ditetapkan dengan kata lain ketepatan realisasi terhadap anggaran kas masih rendah, ini dibuktikan dengan masih adanya deviasi pada realisasi anggaran yang dapat dilihat pada laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah banyak membuahkan hasil ini dibuktikan dari indikator kinerja yang telah tercapai. dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Badan Keuangan Daerah selama 1 Tahun, dengan capaian kinerja Tahun 2019 yang telah tercapai sesuai target. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada tahun berikut.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepa pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Kandangan, 27 Januari 2019

Plt. Kepala Badan,

Drs. H. NANANG. F. M. N, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19711011 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	6
1.4. Dasar Hukum	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.2. Indikator Kinerja Utama	10
2.3. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	12
3.2. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja	13
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	14
3.4. Akuntabilitas Keuangan	15
BAB IV PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target RPJMD Badan Keuangan Daerah	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah.....	10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	11
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Triwulan II	13
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 1.....	15
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 2.....	16
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 3.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerja bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD ini dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Triwulan disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Penyusunan Laporan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”. Laporan ini juga memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama satu tahun.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai Indikator Kinerja Utama serta capaian realisasi anggaran yang dituangkan dalam kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023.

Pada tahun 2019, Badan Keuangan Daerah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang PBB-P2 dan BPHTB, Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Berdasarkan tugas tersebut, Badan Keuangan Daerah akan menjelaskan laporan capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2019.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang keuangan. Sedangkan tugas pokok Badan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Keuangan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai :

- a. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah); dan
- b. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Sebagaimana Pasal (7), Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Dalam menjalankan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah) pada Pasal (7), Ayat (1), Angka (4) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPP A-SKPD; (3).melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- e. Menetapkan SPD;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Sedangkan selaku Kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam Pasal (5), Ayat (3) huruf (c) sebagaimana ketentuan diatas, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya;

- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yakni : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni : Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, Sub Bidang Pengelohan Data dan Informasi dan Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan;
- d. Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah, Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah dan Sub Bidang Dana Perimbangan;
- e. Bidang Anggaran terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni : Sub Bidang Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah I, Sub Bidang Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah II serta Sub Bidang Harmonisasi Sistem Penganggaran dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni: Sub Bidang Penatausahaan Perbedaharaan, Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Gaji Pegawai serta Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni, Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Wilayah I, Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Wilayah II serta Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban;

- h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah, Sub Bidang Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah serta Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan;

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, maka yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :

1. **Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah** yang mana isu strategis ini nantinya mengarah pada peningkatan pendapatan asli daerah
2. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis** yang mana isu strategis ini nantinya akan mengarah pada :
 - a. Opini WTP BPK terhadap LKPD dan
 - b. Predikat AKIP SKPD atas Evaluasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.4 Dasar Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan “Rencana Strategis” sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 16) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 - 2025;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023;
- 20) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ringkasan sebagaimana dibawah ini :

T U J U A N
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

S A S A R A N
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik

Dari pemaparan diatas sekarang akan kita jabarkan indikator sasaran yang mengarah pada pencapaian target SKPD sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki satu indikator sasaran yaitu : Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah

SASARAN 2 : Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- 1) Opini WTP BPK terhadap LKPD
- 2) Nilai/Predikat AKIP

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Berikut ini Sasaran Badan Keuangan Daerah yang ada di muat dalam RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Target RPJMD Badan Keuangan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2019)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	2 Milyar	2 Milyar
2.	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Nilai/Predikat AKIP	BB	BB	A	A	A	A	BB

Untuk mencapai sasaran RPJMD maka diperlukan indikator yang mengacu pada pencapaian target dan sasaran RPJMD tersebut diatas. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah

Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Indikator Sasaran
1	2	3
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	1 M
Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Nilai / Predikat AKIP	BB

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Secara berjenjang semua Pejabat Struktural dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membuat dan menanda tangani perjanjian kinerja tahun 2019. Kepala Badan Keuangan Daerah (Pejabat Tinggi Pratama) telah membuat dan menanda tangani perjanjian kinerja dengan Bupati Hulu Sungai Selatan sebagaimana nampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	Rupiah	1 Milyar
2.	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	2. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3. Nilai / Predikat AKIP	Nilai	BB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Tahun 2019.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebelum kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah terlebih dahulu kami sampaikan Capaian Target RPJMD Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2019 sebagai berikut :

MISI II. MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA DAERAH, BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

INDIKATOR SASARAN : JUMLAH PENINGKATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
TARGET KINERJA	28.822.582.600,00
CAPAIAN KINERJA	29.528.978.331,00

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai akhir Tahun 2019 sebesar 102,45% dari target yang ditentukan sebesar 23 M yang terdiri dari 25 SKPD pengelola penerimaan PAD.

MISI III. MENINGKATNYA KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA BIROKRASI

Adapun hasil capaian indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

IKU 1 : OPINI WTP BPK TERHADAP LKPD	
TARGET KINERJA	≤ 31 Maret 2019
CAPAIAN KINERJA	22 Maret 2019

Capaian Kinerja sampai triwulan II **telah tercapai (terpenuhi)** dengan disampaikannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 pada tanggal **22 Maret 2019** kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

IKU 2 : MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	
TARGET KINERJA	BB
CAPAIAN KINERJA	A

Hasil penilaian AKIP Tahun 2019 ditetapkan Tanggal **5 April 2019** oleh Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan hasil penilaian **A** sesuai dengan SK Nomor : 700/227/ITKAB

3.2 Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan dasar Perjanjian Kinerja. Adapun hasil Pengukuran indikator kinerja sampai dengan akhir Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2019	Realisasi 2019	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	23 M	29,52 M	LRA Per 31 Desember 2019
Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	Hasil audit Laporan Keuangan BPK RI ditetapkan Tanggal 21 Mei 2019
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Nilai / Predikat AKIP	<i>BB</i>	<i>A</i>	Hasil Penilaian AKIP 2018 ditetapkan Tanggal 5 April 2019 oleh Inspektorat Kab. HSS

Dari tabel diatas Capaian Kinerja Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	
Capaian Indikator 1 Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	
TARGET KINERJA	23 Milyar
CAPAIAN KINERJA	29,52 Milyar

Capaiannya sebesar **102,45%** dari target yang dibebankan

SASARAN 2 : Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	
Capaian Indikator 1 Opini WTP BPK terhadap LKPD	
TARGET KINERJA	WTP
CAPAIAN KINERJA	WTP

BPK R.I telah melakukan audit dan hasilnya disampaikan pada Tanggal **21 Mei 2019** dengan predikat Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
Capaian Indikator 2 Nilai/Predikat AKIP	
TARGET KINERJA	BB
CAPAIAN KINERJA	A

Capaian Kinerja Tahun 2019 evaluasi AKIP telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 5 April 2019 dengan predikat interpretasi sangat baik.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dari uraian capaian kinerja sesuai indikator kinerja utama maupun indikator kinerja sasaran tersebut diatas, dapat dievaluasi dan dianalisis sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	
Capaian Indikator 1 Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah (IKU)	

Adalah jumlah realisasi penerimaan semua Retribusi dan Pajak berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah	Rp.	14.412.031.504,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	15.116.946.827,00
JUMLAH	Rp.	29.528.978.331,00

Capaiannya sebesar **102,45%** dari **target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebesar Rp. 23 Milyar** Untuk target Tahunan telah mencapai bahkan melebihi Total Target Tahun 2019.

Untuk tahun 2019, realisasi pendapatan Pajak Daerah dapat memenuhi/melebihi target yang telah direncanakan. Pencapaian tersebut tentunya adalah hasil upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi pajak daerah, baik secara langsung maupun melalui media.
2. Penerbitan surat himbauan, surat teguran dan surat tagihan terhadap objek pajak.
3. Pembuatan dan pendistribusian sarana promosi pajak. (banner dan leaflet)
4. Koordinasi/rapat yang intens dengan SKPD terkait.
5. Pelaksanaan kegiatan anugerah pajak sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap objek pajak.
6. Pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah diatur melalui Peraturan Daerah dan pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan.

Untuk pencapaian realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2019 ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan, namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun 2018. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna meningkatkan penerimaan pada sektor Retribusi Daerah yakni :

1. Koordinasi yang intens dengan SKPD pengelola Retribusi Daerah.
2. Pendataan objek Retribusi Daerah baru.
3. Revisi terhadap Peraturan Daerah sebagai bentuk tindak lanjut pendataan objek Retribusi Daerah baru.
4. Revisi terhadap tarif Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat.

SASARAN 2 : Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi

Capaian Indikator 1 Opini WTP BPK terhadap LKPD

Capaian Kinerja sampai tahun 2019 **telah tercapai** dengan ditetapkan hasil audit Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tanggal 21 Mei 2019 dengan predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** karena sampai saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan tahap kedua BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

SASARAN 3: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian Indikator 2 Nilai / Predikat AKIP

Capaian Kinerja Tahun telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tanggal 5 April 2019 dengan hasil penilaian **Sangat Baik**.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan data realisasi keuangan yang ada pada Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sekretariat Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	82	81,25	81,50	81,75	82	81,25	83,05	83,05	85,17	99,08	101,28	103,86
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Predikat AKIB	Nilai/Predikat	81,89	-	-	-	81,89 (A)	-	-	-	81,89	-	-	-
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	81,25	81,50	81,75	82	81,25	83,05	83,05	85,17	99,08	101,28	103,86
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan Administrasi sesuai Standar	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
1.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan Administrasi sesuai Standar	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
1.3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai Standar	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelayanan Administrasi sesuai Standar	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
1.5	Penyediaan Jasa dan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi sesuai Standar	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
1.6	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Administrasi sesuai Standar	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	81,25	81,50	81,75	82	81,25	83,05	83,05	85,17	99,08	101,28	103,86
2.1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantro dalam Kondisi Baik	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
2.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
3	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
3.1	Majelis TP-TGR	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
3.2	Penigkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	100
4	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Skor	77,06	77,06	-	-	-	77,06	-	-	-	100	-	-
	Meningkatnya Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP	Bobot	BB	-	BB	-	-	-	BB	-	-	-	100	-
	Meningkatnya Kualitas Akuntbls Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Predikat AKIB	Nilai/Predikat	81,89	-	-	-	81,89 (A)	-	-	-	80,10	-	-	97,81
4.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Jumlah Dokumen AKIP yang Memenuhi Aspek Kualitas	1	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-	100	-	-
	Meningkatnya Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah	%	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Predikat AKIB	Nilai/Predikat	81,89	-	-	-	81,89 (A)	-	-	-	80,10	-	-	97,81
4.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-

Berdasarkan Tabel. 3.2 diatas, Pencapaian Kinerja Urusan Kesekretariatan yang mana tujuan strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini realisasi tidak bisa dilaporkan karena tergetnya dalam bentuk tahunan sehingga output disampaikan nantinya setelah penilaian selesai, namun untuk sementara nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yang dapat dimasukkan. Pada tabel tersebut mempunyai 4 (empat) program dan 15 kegiatan. Untuk kegiatan rutin program terdapat 2 buah dan kegiatan pendukung program sebanyak 13 buah yang dilaksanakan sesuai kegiatan pengelolaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang terkait dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas dan Jumlah Laporan Keuangan yang Memenuhi Aspek Kualitas.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Kepuasan Pelayanan hasil capaian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 terealisasi sebesar 85,17 yang berasal dari Penilaian pada Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Semester II Tahun 2019, pencapaian ini melebihi target Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 yaitu sebesar 82. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak melakukan pelayanan publik langsung melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada Bidang-Bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian ditarget pada akhir tahun 2019 namun belum bisa disampaikan nilai yang didapatkan.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki realisasi kegiatan 125,95% atau jumlah 34 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 12 Dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan atau Catatan Laporan Keuangan (Calk). Dari Kegiatan Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan sebanyak 10 di Triwulan I, 1 dokumen di Triwulan II ,5 Dokumen di Triwulan III dan 2 dokumen di triwulan 4 sehingga jumlah dokumen tahun 2019 sebanyak 18 dokumen, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Dokumen Kelengkapan AKIP

NAMA DOKUMEN		JUMLAH
1.	Renstra	1 Dokumen
2.	Berita Acara Reviu Renstra	1 Dokumen
3.	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 Dokumen
4.	Renja 2019 (Murni)	1 Dokumen
5.	Renja 2019 (Perubahan)	1 Dokumen
6.	IKU + SK 2019	1 Dokumen
7.	PK Murni 2019 Es II s/d Ess IV dan Pelaksana	1 Dokumen
8.	PK Perubahan 2019 Es II s/d Ess IV dan Pelaksana	1 Dokumen
9.	Rencana Aksi 2019	1 Dokumen
10.	Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2019	4 Dokumen
11.	Capaian Kinerja Individu Triwulan Tahun 2019	4 Dokumen
12.	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 Dokumen
TOTAL		18 Dokumen

Jumlah Penyusunan Dokumen Keuangan Tahun 2019 sebanyak 16 dokumen. Aspek pemenuhan untuk penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Tabel 3.4
Dokumen Kelengkapan Laporan Keuangan

NAMA DOKUMEN		JUMLAH
1.	Renstra	1 Dokumen
2.	Renja	1 Dokumen
3.	Renja Perubahan	1 Dokumen
4.	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 Dokumen
5.	Pra RKA Murni	1 Dokumen
6.	RKA Murni	1 Dokumen
7.	DPA	1 Dokumen
8.	RKA Perubahan	1 Dokumen
9.	DPA Perubahan	1 Dokumen
10.	Laporan Triwulan	4 Dokumen
11.	Laporan Prognosis Semesteran I	2 Dokumen
TOTAL		16 Dokumen

Pada indikator kinerja program kami target ditiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Bidang PBB dan BPHTB
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	Miliar	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,27						
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Miliar	1.406.055.770	10.000.000	375.000.000	525.000.000	496.055.770	164.538.683	653.023.869	1.432.736.275	1.967.537.883	11,70	46,44	101,90	139,93
1	Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Miliar	1.406.055.770	10.000.000	375.000.000	525.000.000	496.055.770	164.538.683	653.023.869	1.432.736.275	1.967.537.883	11,70	46,44	101,90	139,93
1.1	Pemutakhiran PBB-P2 dan BPHTB	WP	67.328	67.328	-	-	-	67.330	-	-	-	100	-	-	-
1.2	Pelayanan PBB dan BPHTB	Lembar	67.328	67.328	-	-	-	67.330	-	-	-	100	-	-	-
1.3	Promosi PBB dan BPHTB	Kali	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	50	-	100

Pada Tabel 3.5 diatas, pencapaian kinerja bidang PBB dan BPHTB pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Untuk realisasi sasaran Bidang PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada akhir tahun 2019 sebesar Rp. 1.967.537.883,00 atau 139,98% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp.1.406.055.770 dari capaian terlihat bahwa target telah tercapai bahkan melampaui 100%.

Kegiatan Pemutakhiran PBB-P2 dan BPHTB dengan sasaran jenis objek-objek PBB-P2 dan BPHTB sampai saat ini sudah terealisasi sebesar 67.330 wajib pajak dari target tahun 2019 sebesar 67.328 wajib pajak atau 100% Wajib Pajak. Pencapaian realisasi ini merupakan kegiatan yang telah dipenuhinya pemutakhiran data PBB dan BPHTB dari aplikasi SIMPBB sehingga dengan adanya pemutakhiran data ini memudahkan dalam perhitungan dan penerimaan PBB dan BPHTB sehingga dapat meningkatkan PAD.

Kegiatan PBB dan BPHTB dan sasaran dan jenis Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu yaitu pada triwulan I lalu teralisasi sebesar 67.330 dari target sebesar 67.328. Hal ini menggambarkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sudah dicetak dan didistribusikan ke masing-masing Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Target SPPT dan Ketetapan PBB P2
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	SPPT	Ketetapan
1.	Padang Batung	7.288	107.939.397
2.	Loksado	2.744	45.335.356
3.	Telaga Langsat	4.339	57.247.324
4.	Angkinang	6.825	79.320.478
5.	Kandangan	12.966	401.543.182
6.	Sungai Raya	8.410	186.735.191
7.	Simpur	6.414	99.807.084
8.	Kalumpang	2.543	32.795.293
9.	Daha Selatan	7.407	120.611.527
10.	Daha Utara	6.561	92.163.450
11.	Daha Barat	2.133	33.422.350
JUMLAH		67.630	1.256.920.632

Kegiatan Promosi PBB dan BPHTB yang mana kegiatan tersebut hanya dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun yaitu di triwulan II dan triwulan IV. Kegiatan telah di realisasikan di triwulan II lalu dan pada triwulan ke IV Tahun 2019 yaitu rapat dan pemasangan umbul-umbul penyampaian himbauan lunas PBB dan BPHTB yang dilaksanakan di kecamatan untuk memotivasi

masyarakat agar lunas PBB dan BPHTB tepat waktu sehingga pembayaran PBB dan BPHTB tepat waktu.

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Bidang PAD dan Dana Perimbangan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	Miliar	1	0,15	0,40	0,75	1	6,37	13,15	20,76	29,52	29,22	60,32	72,06	102,45
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Miliar	21,8	3,27	8,72	16,35	21,8	6,37	13,15	20,76	29,52	29,22	60,32	72,06	102,45
1	Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan	Miliar	21,8	3,27	8,72	16,35	21,8	6,37	13,15	20,76	29,52	29,22	60,32	72,06	102,45
1.1	Penyediaan Karcis dan Blanko	Jenis	73	-	-	-	73	-	-	-	73	-	-	-	100
1.2	Pendataan Subjek/Objek Pajak Daerah	Wajib Pajak	50	13	25	38	50	20	32	42	52	40	64	84,00	104
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	%	90	15	40	70	90	16	47	78,68	104,89	17,7	52,2	87,39	116,54
1.1	Promosi Pajak Daerah		Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	25	50	75	100

Pada Tabel 3.7 diatas, pencapaian kinerja bidang PAD dan Dana Perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang juga harus dicapai. Untuk realisasi sasaran Bidang PAD dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada akhir tahun 2019 ini sudah menyajikan hasil akhir dari pencapaian kegiatan.

Realisasi program peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 29,52 milyar atau sebesar 102,45% dari target 28,82 milyar sedangkan untuk program penerimaan dana perimbangan realisasi sebesar Rp. 1.057.953.649.787,00 atau sebesar 104,89% dari target yang direncanakan sebesar 100%.

Kegiatan Penyediaan Karcis dan Blanko pada akhir tahun telah direalisasikan sebanyak 73 jenis karcis dan blanko, proses cetak karcis dan blanko untuk pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan pada triwulan IV.

Kegiatan Pendataan subjek/objek pajak daerah sudah dilakukan pada awal tahun dengan melakukan kunjungan atau datang langsung ke pemilik usaha Hotel, Restoran/Rumah Makan/ Warung, tempat hiburan, reklame, parkir, air tanah dan sarang burung walet. Untuk tahun 2019 realisasi sudah mencapai 52 Wajib Pajak baru yang telah dilakukan pendataan yaitu Wajib Pajak Rumah Makan sehingga mencapai 104% dari target yang ditentukan sebanyak 50 Wajib Pajak.

Kegiatan promosi pajak daerah atau rekonsiliasi dan penyampaian data dengan kementerian dilakukan setiap triwulan sekali yang mana tujuan rekonsiliasi dan penyampaian data tersebut untuk kelancaran penyaluran dana transfer dari pusat.

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Bidang Anggaran
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)					
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah		Lama Waktu Penyusunan RAPBD	Bulan	7	-	1	3	3	-	1	3	3	-	1	57,14	100
			Lama Waktu Penyusunan RAPBD Perubahan	Bulan	4	-	1	3	-	-	1	3	-	-	1	100	-
1	Tersedianya Dokumen Anggaran sesuai dengan Waktu yang ditetapkan Wilayah I dan II	Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	%	100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100
1.1	Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	370	370	-	-	-	-	370	-	-	-	100	-	-	-
1.2	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA SKPD	Orang	73	-	-	73	-	-	-	73	-	-	-	-	100	-
1.3	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	100	-	-
1.4	Penyusunan Dokumen DPPA	Jumlah Dokumen DPPA	Dokumen	74	-	-	-	74	-	-	-	74	-	-	-	-	100
1.5	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Bimtek Penyusunan RKAS	Sekolah	273	-	273	-	-	-	273	-	-	-	-	100	-	-
1.6	Penyusunan Rancangan APBD	Jumlah Dokumen APBD	Dokumen	6	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	100	-
1.7	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen APBD	Dokumen	6	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	100	-
1.8	Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD	Jumlah Pergeseran APBD	Dokumen	3	1	2	-	-	-	1	2	-	-	100	100	-	-

Pada Tabel 3.8 diatas, pencapaian kinerja bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai. Untuk realisasi sasaran Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 ini sudah terealisasi sepenuhnya . Sasaran Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah yang mana indikatornya waktu penyelesaian APBD dan APBD Perubahan yang mana pada akhir tahun atau triwulan IV telah selesai dilaksanakan.

Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah dilaksanakan pertriwulan sehingga kegiatan penyusunan dokumen anggaran Wilayah I dan Wilayah II selalu terselesaikan tepat waktu.

Kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebanyak 370 dokumen terealisasi pada triwulan I sehingga pada triwulan II tidak ada begitu juga triwulan III dan triwulan IV. Penyusunan Dokumen ini yaitu mencetak dan memperbanyak hasil pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan setelah disetujui DPRD daerah dan DPRD Provinsi baru disahkan menjadi DPA. Penyusunan dokumen DPA ini memang seharusnya dilaksanakan pada triwulan I mengingat seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah harus jalan pada awal bulan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPA) sebanyak 73 orang telah dilaksanakan pada triwulan III. Bimbingan teknis dimaksud bertujuan memberi pengarahan dan petunjuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran bagi seluruh pegawai teknis yang kompeten di bidang anggaran masing-masing OPD.

Kegiatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah dari hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan penyusunan dokumen KUA dan PPAS sebanyak 4 dokumen ini telah dilaksanakan pada triwulan II sehingga realisasi kegiatan pada triwulan II tercapai.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran merupakan kegiatan penyusunan perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun 2019. Penyusunan dokumen ini telah dilaksanakan pada triwulan IV. Target dokumen yang disusun sebanyak 74 dokumen yang memuat seluruh OPD dan telah selesai di proses seluruhnya, karena pada

triwulan IV ini APBD telah selesai disusun kemudian melalui proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Kegiatan Bimbingan Teknis RKA Sekolah dilakukan sebanyak 273 sekolah dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah atau setingkatnya baik negeri maupun swasta. Kegiatan ini bermanfaat untuk pihak sekolah khususnya Kepala Sekolah menggunakan dan mengelola dana yang tersedia dengan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II dengan mengadakan pertemuan antara Tim Anggaran dan Pihak Sekolah sehingga pada triwulan II ini sudah terealisasi.

Kegiatan Penyusunan Rancangan APBD memiliki target sebanyak 6 dokumen. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat rancangan keuangan oleh Pemerintah Daerah dan dijadikan sebagai pedoman Pemda dalam mengatur Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kesejahteraan daerah dan juga sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan pada triwulan III.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD juga memiliki target sebanyak 6 dokumen. Kegiatan ini tujuan hampir sama dengan penyusunan rancangan APBD untuk membuat rancangan perubahan keuangan oleh Pemerintah Daerah dan dijadikan sebagai pedoman Pemda dalam mengatur Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan ini dilakukan karena adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan. Kegiatan ini juga telah dilaksanakan pada triwulan III.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD memiliki target sebanyak 3 dokumen. Kegiatan ini bertujuan untuk mengeser anggaran pada unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang hanya menggunakan mekanisme persetujuan DPRD. Kegiatan ini telah dilakukan dan terealisasi pada triwulan I dan triwulan.

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Bidang Perbendaharaan
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)					
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan		Opini WTP BPK terhadap LKPD	%	100	5	15	50	100	5	15	50	100	5	15	50	100
1	Pengelolaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah	%	Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	5	15	50	100	5	15	50	100	5	15	50	100
1.1	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan SP2D	PA/KPA	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda		73	18	36	54	73	18	36	54	78	25	49	73,97	100
1.2	Terlaksananya Layanan Pengelolaan Belanja dan Pembiayaan Daerah	Kali	Jumlah Daftar Gaji Pegawai yang diterbitkan Tepat Waktu		12	3	6	9	12	3	6	9	12	25	50	75	100
1.2	Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	%	Persentase Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu		100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50-	75	100

Pada Tabel 3.9 diatas, pencapaian kinerja Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai. Untuk realisasi sasaran Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terukur setiap triwulannya sehingga pencapaian realisasi otomatis dapat dilaksanakan.

Program Pengelolaan Pengelolaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah sampai dengan triwulan IV sudah mencapai 100% dari target sebesar 100% artinya realisasi tahun 2019 untuk program ini telah sesuai target yang telah ditentukan karena pencapaian program selalu terukur dan dapat terealisasi setiap triwulan .

Kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda dengan sasaran pelayanan penerbitan SP2D sebanyak 73 Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang mana pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD melalui SPM. Kegiatan penerbitan SP2D ini sudah terealisasi sebanyak 73 PA/KPAD di tahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk layanan pengelolaan Kasda dan Gaji Pegawai dengan target setiap tahun sebesar 12 kali yang mana dilaksanakan setiap bulan sekali untuk membayar gaji pegawai. Realisasi kegiatan pengelolaan Kasda dan gaji pegawai juga telah dilakukan setiap bulannya dan telah mencapai sesuai dari target yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut telah terukur.

Kegiatan Penyaluran dana Hibah dan Bansos tterdapat dua pengertian yaitu dana hibah meruapakan pemberian uang/barang dan jasadari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang telah diperuntukan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan dana Bansos adalah pemberian bantuan uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Untuk tahun 2019 kegiatan ini telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% yang berarti kegiatan tersebut juga telah terukur.

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100
1	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	%	100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100
1.1	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	Dokumen	273	-	273	-	273	-	273	-	278	-	100	-	100
1.2	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	Dokumen	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100
1.3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	-	1	2	-	-	1	2	-	-	50	100	-
1.4	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-
1.5	Penyusunan Laporan Keuangan Penda	Sekolah	1	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-	-

Pada Tabel 3.10 diatas, pencapaian kinerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai sasaran, program dan kegiatan yang juga harus dicapai. Untuk realisasi sasaran Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terukur setiap triwulannya.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS dimana target yang ditentukan pada tahun 2019 sebesar 273 dokumen. Rekonsiliasi BOS yang dimaksud adalah melakukan koreksi dan persamaan persepsi laporan keuangan BOS dengan aturan yang berlaku untuk mengukur pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah. Kegiatan ini merupakan wujud nyata untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan sehingga kedepannya tidak ada lagi kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Kegiatan ini dilaksanakan setiap satu semester sehingga pada tahun 2019 telah tercapai dokumen rekonsiliasi BOS yang terealisasi sebanyak 273 dokumen pada tiap semesternya.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN dimana target yang ditetapkan sebanyak 21 dokumen pada tahun 2019. Kegiatan ini merupakan pencocokan data kepesertaan pegawai untuk mengukur pendapatan belanja daerah antara Pemda dengan BPJS Kesehatan. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap triwulan sehingga pencapaian pada tahun 2019 ini telah terealisasi sebanyak 21 dokumen.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kegiatan menghimpun dan menyusun Peraturan Kepala Daerah/Perbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan APBD baik APBD Murni maupun APBD Perubahan. Kegiatan Penyusunan Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan APBD Murni telah dilaksanakan pada triwulan II dan kegiatan Penyusunan Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan APBD Perubahan telah selesai dilaksanakan pada triwulan III ini sehingga pada kegiatan ini capaian target untuk tahun 2019 telah tercapai 100%.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kegiatan menghimpun dan menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD baik murni maupun perubahan. Kegiatan ini dilakukan pada triwulan II sehingga realisasi triwulan II telah tercapai sebanyak 2 dokumen yaitu Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD murni dan perubahan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini pada tahun 2019 telah tercapai 100%.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda merupakan kegiatan menghimpun dan menyusun Laporan Keuangan seluruh kegiatan OPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya sebagai bahan audit dari BPK RI. Kegiatan ini dilakukan pada triwulan I sebanyak 1 dokumen sehingga untuk triwulan berikutnya tidak dilakukan lagi karena telah tercapai sesuai target yang telah ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda telah tercapai 100%.

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)					
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Memenuhi Aspek Kualitas		100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100
1	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	%	100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100		
1.1	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	Dokumen	273	-	273	-	273	-	273	-	273	-	100	-	100		
1.2	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	Dokumen	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100		
1.3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	-	1	2	-	-	1	2	-	-	50	100	-		
1.4	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-		
1.5	Penyusunan Laporan Keuangan Penda	Sekolah	1	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-	-		

SASARAN 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**Indikator Sasaran Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah**

Untuk Sasaran 1 Indikator 1 pencapaiannya di didukung oleh Program dan Kegiatan dengan progres akuntabilitas keuangan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Program dan Kegiatan Penunjang pada Sasaran 1

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	1. Penyediaan Karcis dan Blanko	248.523.000	231.129.750
	2. Promosi Pajak Daerah	230.500.000	146.587.880
Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	1. Pemutakhiran Data PBB – P2 dan BPHTB	212.909.500	193.045.750
	2. Promosi PBB dan BPHTB	84.290.000	69.390.000
	3. Pelayanan PBB dan BPHTB	625.385.500	594.098.000

SASARAN 2 : Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi**Indikator Sasaran Opini WTP BPK terhadap LKPD**

Untuk Sasaran 2 Indikator untuk pencapaiannya di didukung oleh Program dan Kegiatan dengan progres akuntabilitas keuangan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 2

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	30.800.000	30.800.000
	2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	27.300.000	24.227.500

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	50.560.000	39.060.000
	2. Penyusunan Dokumen Realisasi JKN	6.120.000	5.780.000
	3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTtg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	54.660.000	54.588.000
	4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	42.478.000	41.728.000
	5. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	90.220.000	84.321.000

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	1. Penyusunan Dok.DPA	46.820.000	17.285.000
	2. Bimtek Penyusunan RKA SKPD	9.850.000	6.200.000
	3. Penyusunan Dok. KUA dan PPAS	41.994.000	9.735.000
	4. Penyusunan Dokumen DPPA	51.400.000	17.310.000
	5. Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	31.410.000	27.200.000
	6. Penyusunan Rancangan APBD	109.900.000	81.741.200
	7. Penyusunan Ranc. Perubahan APBD	119.800.000	97.070.600
	8. Penyusunan Dok. Pergeseran APBD	41.350.000	38.533.000

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD	1. Peningkatan Manajemen Aset/BMD	151.375.000	51.008.000
	2. Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/ Aset Daerah	725.400.000	459.470.861
	3. Pemutakhiran Data BMD	183.575.000	84.195.000
	4. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	48.450.000	22.550.550
	5. Pengelolaan Aset Rumah Dinas	807.050.000	774.923.339
	6. Pengadaan Aset Daerah	4.244.215.000	3.658.650.000

SASARAN 3: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Sasaran Nilai/Predikat AKIP

Untuk Sasaran 3 pencapaiannya di didukung oleh Program dan Kegiatan dengan progres akuntabilitas keuangan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 3

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Pelayanan Adm. Perkantoran	1. Pelayanan Jasa dan Adm. Perkantoran	282.150.000	214.068.850
	2. Penyediaan Jasa Kom, SD Air & Listrik	168.000.000	131.478.701
	3. Penyebarluasan Informasi Tupoksi SKPD	14.000.000	14.000.000
	4. Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000	22.428.000
	5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	275.250.000	241.307.221
	6. Rapat2 Koord. Konsul. Dan Lap.	924.929.499	916.687.389

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan Gedung Kantor	988.000.001	970.085.500
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlenk. Kantor	312.709.400	304.848.708
	3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	172.000.000	84.937.778
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.350.000	11.226.500

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan	1. Penyusunan Dok. Keuangan	4.700.000	4.700.000

Capaian Kinerja dan Keuangan	2. Penyusunan Dokumen AKIP	4.700.000	4.630.000
------------------------------	----------------------------	-----------	-----------

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	1. Majelis TP TGR	19.550.000	2.788.500

Berdasarkan data tersebut diatas, maka realisasi keuangan pada tahun 2019 secara keseluruhan telah mencapai sebesar Rp. 9.783.815.577,00,- atau 84,53% dari target sebesar Rp. 11.573.673.900,00. Dari rincian realisasi per kegiatan diatas dapat terlihat bahwa realisasi anggaran belanja langsung Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 berdasarkan sasaran dan indikator yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja SKPD mencapai 84,53%, adapun sisa anggaran dari realisasi rata-rata kegiatan merupakan efisiensi dan pada kegiatan yang ada belanja modalnya merupakan sisa kontrak/lelang.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada tahun 2019 semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Sasaran adalah :

1. Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah (IKU)
Jumlah realisasi penerimaan PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 29.528.978.331 atau sebesar 102,45% dari Target Tahun 2019 sebesar Rp. 23 Milyar yang mana realisasi tersebut sudah melebihi dari target yang ditentukan.
2. Opini WTP BPK terhadap LKPD
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 telah diserahkan pada Tanggal 22 Maret 2019 ke BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan dan hasil audit telah ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019 dengan hasil penilaian memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Nilai / Predikat AKIP
Penilaian SAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai dan hasil penilaian ditetapkan sesuai dengan SK Nomor 700/227/ITKAB Tanggal 5 April 2019 yang hasil penilaian memperoleh interpretasi A (sangat baik).

Untuk realisasi keuangan sampai akhir tahun 2019 mencapai sebesar Rp. 9.783.815.577,00,- atau 84,53% dari target belanja langsung sebesar Rp. 11.573.673.900,-